



Seorang guru menunjukkan koleksi buku bacaan di pojok baca sekolah di Kalimantan Utara. Inisiatif pojok baca ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menumbuhkan budaya baca sejak dini. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Meningkatkan Kesenjangan, Inklusi, dan Respons Perubahan Iklim di Lingkungan Belajar Kabupaten Bulungan

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Bulungan: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Bulungan belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Bulungan meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, perlakuan terhadap murid yang didasari stereotip gender tradisional, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Bulungan untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdampak signifikan, serta (5) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 36,31; perempuan 38,79

Numerasi : Laki-laki 28,89; perempuan 29,38

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 4-6 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Bulungan, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Bulungan pada April 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 1-3 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Meski kekerasan seringkali terjadi antarmurid, guru kadang masih memberikan hukuman verbal dan fisik pada murid. Kasus tersebut dapat berdampak pada proses belajar dan tumbuh kembang murid (dalam hal motivasi, konsentrasi, dan interaksi sosial).

Selain itu, persepsi terhadap peran dan tanggung jawab murid masih terbatas pada *stereotip* gender tradisional. Misalnya, perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki didorong mencapai pendidikan tinggi karena harus menafkahi keluarga. Hal ini merefleksikan ketidaksetaraan, yang kemudian membatasi capaian belajar dan aspirasi murid.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 466 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 8% tidak sekolah dan 92% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (30%), sekolah inklusi (32%), atau sekolah luar biasa/SLB (30%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung (guru pendamping dan terapis) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali dikucilkan.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil (perkebunan sawit, kampung nelayan, dan hutan pedalaman), murid belum bisa berbahasa Indonesia, murid harus bekerja, dan murid tanpa orang tua.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Bulungan mencapai 144,18 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Kalimantan Utara (148,16), tetapi di atas indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, banjir, kebakaran hutan/lahan, longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, dan tsunami berisiko tinggi di kabupaten ini.

Meski begitu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan perubahan iklim masih terbatas. Mereka masih membakar sampah atau membuangnya ke sungai. Pendidikan perubahan iklim di sekolah pun baru berupa pengenalan dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan (membuang sampah pada tempatnya, membawa tempat makan dan botol minum sendiri, serta menanam pohon), belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum dan menyentuh tingkat kesadaran murid.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, migrasi, bahasa, dan gender—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Putus sekolah akibat perubahan iklim

Bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir bandang, membuat orang tua mengeluarkan anak penyandang disabilitas dari sekolah karena masalah biaya dan keamanan.



Kemiskinan dan absensi orang tua

Sebagian besar anak-anak yang bermasalah dengan hukum, biasanya anak laki-laki, berasal dari keluarga miskin atau tanpa orang tua. Mereka memakai narkoba dan mencuri untuk bertahan hidup. Mereka pun seringkali masuk penjara dewasa, alih-alih penjara anak, karena keterbatasan fasilitas.



Risiko daerah perbatasan dan terpencil

Daerah perbatasan dan terpencil, salah satunya perkebunan sawit, meningkatkan risiko peredaran narkoba, perdagangan orang, dan ketidakjelasan dokumen legal bagi anak pekerja migran. Remaja perempuan juga berisiko menghadapi kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal ini disebabkan area terisolasi, lemahnya pengawasan, dan relasi kuasa yang tidak seimbang.



Ekspektasi orang tua terhadap anak

Harapan orang tua untuk anak laki-laki—berhasil dalam pendidikan dan finansial—yang tidak sesuai dengan realitas menyebabkan anak memiliki masalah perilaku dan capaian belajar rendah.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Bulungan untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi program pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti pendidikan karakter, tindakan disiplin positif yang relevan dengan perilaku murid, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.
2. Memperluas jangkauan program pencegahan kekerasan, salah satunya penyediaan layanan bantuan bagi sekolah dalam mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Program ini bertujuan membantu sekolah mensosialisasikan pentingnya pencegahan kekerasan pada murid dan orang tua.



**Dinas Pendidikan & Dinas Sosial:
Mendorong pemenuhan pelayanan
dan akomodasi yang layak bagi murid
penyandang disabilitas**

1. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
2. Memperkuat kapasitas dan peran Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif, yang kini menjalankan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan. Dengan begitu, murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
3. Memastikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berjalan secara optimal, sehingga murid penyandang disabilitas memperoleh dukungan yang sesuai kebutuhannya dan sekolah mampu menyediakan fasilitas yang inklusif.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



**Dinas Sosial: Memperluas akses
program kesejahteraan sosial dan
bantuan ekonomi bagi murid dari
keluarga miskin dan daerah terpencil**

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin dan yang tinggal di daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



**Dinas Lingkungan Hidup:
Menerapkan kebijakan dan program
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
yang berdampak signifikan**

1. Mengaplikasikan kebijakan dan praktik baik aksi perubahan iklim di tingkat nasional dan provinsi sebagai kebijakan, rencana, dan program kegiatan di tingkat kabupaten. Misalnya, membentuk sistem pengelolaan sampah di masyarakat, mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan, dan melatih guru untuk menerapkan aktivitas kokurikuler terkait perubahan iklim.
2. Berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan mengenai dampak pembangunan kawasan baru terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Hal ini bertujuan menghindari polusi udara dan suara, kerusakan fasilitas, serta bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan belajar murid.
3. Mengoptimalkan kesiapsiagaan instansi bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), di kecamatan lintasan sungai yang rentan mengalami banjir.



**Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang: Memperkuat koordinasi
dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian dukungan
(terutama bagi murid penyandang disabilitas, murid korban kekerasan, dan murid
kekurangan gizi) dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran**